

**POTENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PT. LIPPO  
CIKARANG (KASUS MEIKARTA)**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2022

# **POTENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PT. LIPPO CIKARANG (KASUS MEIKARTA)**

**Sarah Aulia Rahmatika, 1920112019, Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 136 hlm, 2022**

## **ABSTRAK**

Korporasi merupakan bagian dari subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. PT. Lippo Cikarang merupakan korporasi yang menangani proyek Meikarta, pada tahun 2017 para pemimpin dan beberapa anggota dari PT ini tertangkap tangan melakukan tindak pidana suap kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Bekasi. Para pemberi suap melakukan tindakan ini semata-mata untuk memberikan kemudahan perizinan pembangunan proyek Meikarta, sehingga terlihat jelas bahwa yang diuntungkan di sini adalah korporasi nya dan dalam kasus ini dapat diminta pertanggungjawaban pidananya oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tindak pidana suap yang dilakukan oleh PT Lippo Cikarang dengan melakukan analisis mengenai penjatuhan sanksi kepada korporasi dan bagaimana korporasi tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Penulis tertarik membahas 1) Bagaimanakah potensi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh PT. Lippo Cikarang (Kasus Meikarta)? 2) Bagaimanakah potensi penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana suap yang dilakukan oleh PT. Lippo Cikarang untuk mencapai tujuan pembedaan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa: 1) Pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana suap dapat dilakukan karena korporasi merupakan sebuah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Pada PT Lippo Cikarang telah melakukan tindak pidana suap kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk kepentingan keuntungan dari korporasi itu sendiri. Oleh karena itu sudah sepatutnya korporasi nya dimana PT Lippo Cikarang ini dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. 2) Penjatuhan sanksi pidana bagi PT. Lippo Cikarang dapat dikenai pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokoknya berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Sedangkan pidana tambahan pada korporasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pada Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga diharapkan memberikan efek penjeratan kepada pelaku usaha atau korporasi dalam hal ini PT Lippo Cikarang pada khususnya agar tidak mengulangi lagi dan pada umumnya memberikan pembelajaran bagi korporasi lainnya.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Suap**

# **POTENTIAL OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN THE CRIME OF BRIBERY PERFORMED BY PT. LIPPO CIKARANG (MEIKARTA CASE)**

**Sarah Aulia Rahmatika, 1920112019, Masters Program in Law Faculty of Law, Andalas University Padang, 136 pp., 2022**

## **ABSTRACT**

Corporations are part of the subject of criminal law and can be held accountable for their actions. PT. Lippo Cikarang is a corporation that handles the Meikarta project, in 2017 the leaders and several members of this PT were caught in the act of committing a crime of bribery to the Bekasi Regency government. The bribe givers took this action solely to facilitate the licensing of the Meikarta project development, so it is clear that the beneficiaries here are the corporations and in this case they can be held criminally responsible. carried out by PT Lippo Cikarang by analyzing the imposition of sanctions on corporations and how the corporation can be held criminally responsible. The author is interested in discussing 1) How is the potential for corporate criminal liability in the bribery crime committed by PT. Lippo Cikarang (Meikarta Case)? 2) How is the potential for imposing criminal sanctions for corporations that commit bribery crimes committed by PT. Lippo Cikarang to achieve the goal of punishment? This research is a normative legal research that uses library materials or secondary data. Based on the results of the research that the author has done, the results are that: 1) Liability against corporations that commit bribery crimes can be carried out because corporations are legal subjects that can be held accountable. PT Lippo Cikarang has committed a criminal act of bribery to the ranks of the Bekasi Regency government for the benefit of the corporation itself. Therefore, it is appropriate for the corporation where PT Lippo Cikarang can be accounted for in criminal law. 2) The imposition of criminal sanctions for PT. Lippo Cikarang can be subject to basic and additional penalties. The principal punishment is a fine with a maximum penalty plus 1/3 (one third). Meanwhile, additional crimes against corporations can be carried out in various forms, such as Article 10 of the Criminal Code and Article 18 of Law 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. So that it is expected to provide a deterrent effect to business actors or corporations in this case PT Lippo Cikarang in particular so that they do not repeat themselves and in general provide lessons for other corporations.

**Keywords: Criminal Liability, Corporate, Bribery**